



# **Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021**

*Jalan Dharma Praja No. 6 Gunung Tinggi Batulicin-Tanah Bumbu-Kalimantan Selatan  
Telepon/Faksimile (0518) 6076023 e-mail : [disdiktanbukab@gmail.com](mailto:disdiktanbukab@gmail.com)  
Website: [disdikpora.tanahbumbukab.go.id](http://disdikpora.tanahbumbukab.go.id)*

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2011–2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. Yang telah direvisi.

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai–nilai dan faktor–faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di SKPD Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu Renstra ini perlu difahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan dan Kebudayaan secara sinergis dan berkesinambungan.

Batulicin, 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan

**Ir. Sartono, M. Si**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II .....	7
GAMBARAN PELAYANAN.....	7
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	13
2.3 KINERJA PELAYANAN .....	16
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN.....	33
BAB III .....	35
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	35
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 35	
3.2 TELAHAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....	35
3.3 TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	36
3.4 TELAHAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP RPJMD.....	39
3.5 PENEMUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	40
BAB IV.....	42
TUJUAN DAN SASARAN .....	42
4.1 TUJUAN DASARAN JANGAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	42
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	43
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	41
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	41
BAB VI.....	45

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII.....	54
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VIII.....	56
PENUTUP .....	56

## DAFTAR TABEL

	halaman
tabel 2. 1 Data Pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	11
tabel 2. 2 data pokok PAUD tahun ajaran 2018/2019 .....	13
tabel 2. 3 data pokok SD tahun ajaran 2018/2019 .....	14
tabel 2. 4 data pokok SLTP tahun ajaran 2018/2019 .....	14
tabel 2. 5 data pokok pendidikan non formal tahun ajaran 2018/2019 .....	15
tabel 2. 6 pencapaian APK PAUD 2016-2018.....	16
tabel 2. 7 pencapaian APM SD/MI 2016-2018 .....	17
tabel 2. 8 pencapaian APK SMP/MTs 2016-2018.....	18
tabel 2. 9 pencapaian APM SMP/MTs 2016/2018 .....	19
tabel 2. 10 pencapaian angka kelulusan SD/MI 2016-2018 .....	20
tabel 2. 11 pencapaian angka kelulusan SMP/MTs 2016-2018.....	20
tabel 2. 12 data kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu .....	21
tabel 2. 13 T-C. 23 review pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu .....	22
tabel 2. 14 T-C.24 anggaran dan realisasi pendanaan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu .....	33
 tabel 3. 1 T-B. 35 pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah .....	 35
 tabel 4. 1 tujuan .....	 42
tabel 4. 2 sasaran.....	42
tabel 4. 3 T-C. 2.5 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d 2021 .....	44
 tabel 5. 1 T-C.26 tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan .....	 42
 tabel 6. 1 T-C. 27 rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu .....	 46

tabel 7. 1 T-C.28 indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	55
---	----

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
gambar 2. 1 struktur organisasi .....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu pilar dalam memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Pasal 28 C UUD 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Proses pengembangan pendidikan menuntut pemerintah untuk konsisten pada isi konstitusi, memenuhi amanat Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bidang kebudayaan, Pasal 32 UUD 1945 menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional



yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga tujuan, program sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada lingkungan yang semakin kompetitif.
2. Sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan lima tahunan
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Sebagai acuan dalam mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis, terarah, terkendali dan berkesinambungan.
5. Sebagai landasan pengembangan pemikiran, sikap, dan tindakan pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Sebagai landasan peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan menuju terciptanya pelayanan prima.
7. Sebagai alat/sarana koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yaitu:

##### **BAB I. : Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II. : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mendeskripsikan bagaimana gambaran pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya. Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

### **BAB III. : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini uraian tugas pokok dan fungsi dipertegas dalam bentuk pembahasan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV. : Tujuan Dan Sasaran**

Pada bagian ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hubungan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan RPJMD

### **BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan RPJMD .

### **BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan**

Pada bagian ini dijelaskan tentang rencana program dan kegiatan dan dikaitkan dengan pendanaan indikatif setiap program dan kegiatan lima tahunan.

### **BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bagian ini berisi tentang penjabaran indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk direalisasikan selama lima tahun ke depan.

### **BAB VIII : Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan hal-hal penting yang menjadi perhatian berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

###### **a. Tugas:**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan Kebudayaan

###### **b. Fungsi:**

- 1) Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang pendidikan dasar;
- 3) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- 5) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang kebudayaan
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 7) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

## **2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris**

Tugas Sekretaris adalah melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, informasi, dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawahi sub-sub bagian berikut :

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan rencana kerja dinas, dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian.
- c) Sub Bagian Informasi dan Pelaporan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, dalam rangka pelaksanaan kegiatan informasi dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **3. Bidang Pendidikan Dasar**

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dasar dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

- a) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, dan pengordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kurikulum.

- b) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan kesiswaan.
- c) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar.

#### **4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

- a) Seksi Pendidik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kebutuhan, pembinaan karir dan mutasi pendidik.
- b) Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kependidikan.
- c) Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **5. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dengan membawahi seksi-seksi berikut ini.



- a) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang Seni dan Budaya.
- b) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasana kesenian dan kebudayaan

## **6. Bidang PAUD dan Dikmas**

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

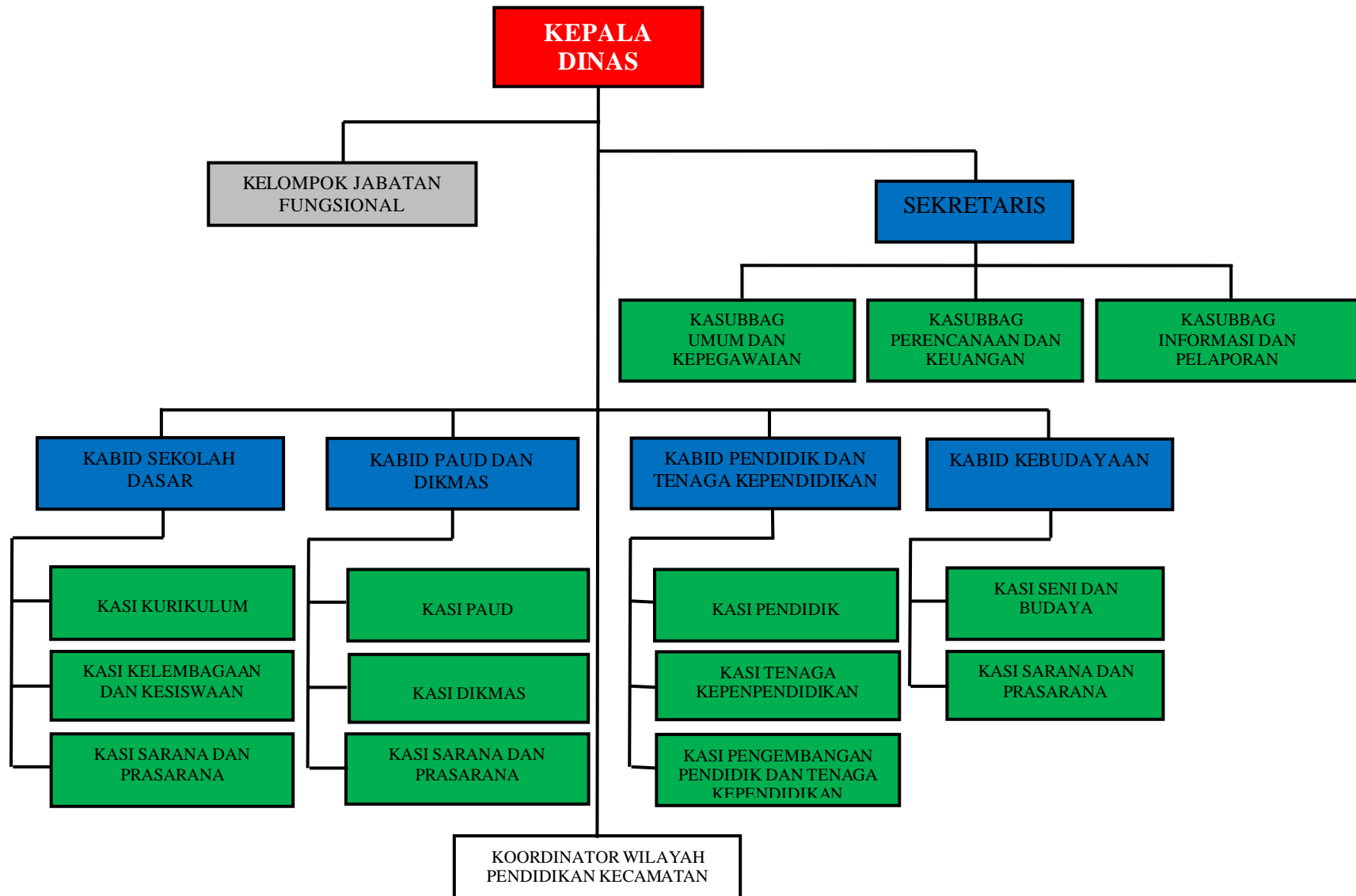
- a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini.
- b) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan masyarakat.
- c) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki kantor Koordinator Pendidikan di masing-masing Kecamatan yang dikepalai oleh Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan dibantu oleh beberapa orang staf. fungsinya sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memaksimalkan pelayanan

mengingat sebaran sekolah yang dilayani cukup luas. Jumlah Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang dikelola ada 10 Unit. Dalam memberikan pembinaan langsung ke masing-masing jenjang sekolah dilakukan oleh Pengawas dan oleh Penilik Pendidikan Non Formal di lembaga pendidikan.

tabel 2. 1 Data Pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Komponen	Jumlah
1	Kantor Dinas Kabupaten	1 unit
	• Pegawai Negeri Sipil	38 org
	• Pegawai Tidak Tetap (PTT)	33 org
	• Pegawai Honor Kantor	9 org
	• Pegawai Honor Penjaga Makam	11 org
2	Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan	10 unit
	• Pegawai Negeri Sipil	33 org
	• Pegawai Tidak Tetap (PTT)	49 org
3	Pengawas/Penilik	
	• Pengawas TK	2 org
	• Pengawas SD	22 org
	• Pengawas SMP	9 org
	• Penilik	11 org



gambar 2. 1 struktur organisasi

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kondisi sarana prasarana termasuk aparatur pengelola sangat menentukan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Sehingga kualitas sarana prasarana terus diupayakan ketersediaannya. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola beragam aset yang sebagian besar tersebar pada sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan.

### 1. Tingkat PAUD

*tabel 2.2 data pokok PAUD tahun ajaran 2018/2019*

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah :	
	1. TK Negeri	15
	2. TK Swasta	256
	3. KB	70
	4. TPA	3
2.	Siswa	12552
3.	Guru	1375
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	646
	Ruang Guru	23
	Ruang Kepala Sekolah	6
	Ruang Serbaguna	7
	MCK Guru	95
	MCK Siswa	118

## 2. Tingkat SD/MI

tabel 2.3 data pokok SD tahun ajaran 2018/2019

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah	194
2.	Siswa	36.084
3.	Guru	2266
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	1571
	Ruang Guru	143
	Ruang Perpustakaan	90
	Ruang Kesehatan	37
	Ruang Kepala Sekolah	44
	Ruang Serba guna	4
	Ruang TU	12
	MCK Guru	229
	MCK Siswa	324
	Musholla	21
	Laboratorium IPA	5
	Laboratorium Bahasa	4
	Laboratorium Komputer	1

## 3. Tingkat SLTP

tabel 2.4 data pokok SLTP tahun ajaran 2018/2019

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah	60
2.	Siswa	12.236
3.	Guru	1001
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	441
	Ruang Guru	48
	Ruang Perpustakaan	50

	Ruang Kesehatan	26
	Ruang Kepala Sekolah	32
	Ruang Serba guna	10
	Ruang Keterampilan	7
	Ruang BK	9
	Musholla	27
	MCK Guru	83
	MCK Siswa	145
	Ruang TU	30
	Ruang Osis	8
	Ruang Multi Media	2
	Laboratorium IPA	38
	Laboratorium Biologi	1
	Laboratorium Bahasa	13
	Laboratorium IPS	1
	Laboratorium Komputer	5

#### 4. Tingkat Pendidikan Non Formal

*tabel 2.5 data pokok pendidikan non formal tahun ajaran 2018/2019*

No	Variabel	2018/2019				
		KF	Paket A	Paket B	Paket C	JLH
1.	Warga Belajar	200	181	625	996	1270
2.	Kelompok Belajar	30	8	11	30	79
3.	PKBM	6	5	5	8	24
4.	Tutor	30	16	66	210	322
5.	Pengelola	30	8	11	30	79

## 2.3 KINERJA PELAYANAN

### 1. Angka Partisipasi Kasar APK PAUD

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini selama periode 2016-2018 terlihat terus mengalami kenaikan, hal ini merupakan dukungan dari semua pihak khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu untuk terus mengupayakan terbangunnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di semua desa, agar dapat membuka akses bagi penduduk usia dini untuk memperoleh layanan pendidikan. Mengingat PAUD merupakan pendidikan awal sebelum mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya sehingga diperlukan penyiapan lebih ekstra untuk siap mengikuti pendidikan ke jenjang berikutnya. Perkembangan APK PAUD dari tahun 2016-2018 terlihat pada tabel dibawah ini:

*tabel 2. 6 pencapaian APK PAUD 2016-2018*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya APK PAUD Mencapai 75,48%	APK PAUD	2016	60,52%	70,37%	116.20
		2017	65,99%	74,63%	113.09
		2018	68,50%	75,48%	110.19

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada RPJMD ditahun 2016 (awal periode) sebesar 60,52%, maka target APK PAUD telah tercapai, terlihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari tahun 2016 angka ini mencapai 70,37%, di tahun 2017 angka ini naik menjadi 74,63% dan ditahun 2018 menjadi 75,48%. Sementara diakhir masa periode RPJMD tahun 2021 angka ini ditargetkan sebesar 78,00%. Untuk mencapai target tersebut yang telah ditentukan masih ada jangka waktu selama 2 tahun ke depan, melalui beberapa program diantaranya program satu desa satu PAUD dan program pembinaan PAUD dengan mengangkat bunda-bunda PAUD ditingkat Kabupaten dan dimasing-masing Kecamatan, dengan tujuan untuk mensosialisasikan mengenai

pentingnya PAUD di daerahnya masing-masing, serta kegiatan penyelenggaraan gebyar PAUD dan pemeran dalam rangka Hari Anak Nasional. Selain itu dengan adanya bunda PAUD, dapat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan PAUD serta mendorong pembinaan PAUD disetiap wilayah yang menyangkut penyediaan, ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian pemerolehan layanan PAUD. Adapun permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Peningkatan APK terberat pada rentang usia 0-2 tahun, dikarenakan masih jarang anak usia tersebut yang masuk PAUD;
- 2) Lembaga PAUD masih belum terpenuhi terutama di beberapa desa terpencil;
- 3) Ketersediaan tenaga pengajar yang masih terbatas terutama yang memiliki pendidikan berlatar belakang Pendidikan S1 PAUD. Dari 1.483 baru 689 yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PAUD dengan persentase 46,45%;
- 4) Ketersediaan prasarana terutama bangunan gedung yang masih kurang dan sarana pendukung pembelajaran;

## 2. Angka Partisipasi Murni APM SD/MI

Untuk melihat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*tabel 2. 7 pencapaian APM SD/MI 2016-2018*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya APM SD Mencapai 93,04%	APM SD	2016	99,40%	99,74%	100,34
		2017	99,45%	99,21%	99,76
		2018	99,50%	93,04%	93,51



Bila dilihat perkembangan capaian dalam kurun waktu 3 (tahun) tahun terakhir yaitu target ditahun 2016 APM SD/MI adalah sebesar 99,40% menjadi 99,74%. Pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 99,45% namun terget tersebut belum tercapai hanya sebesar 99,21% dan pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 99,50% namun terget tersebut belum juga tercapai hanya sebesar 93,04%. Kondisi ini disebabkan adanya beberapa anak yang berusia 7-12 tahun namun tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua dan Masih terdapat penduduk yang jauh dari jangkauan layanan pendidikan terutama didaerah dengan geografis dan transportasi yang sulit untuk ditempuh.

### 3. Angka Partisipasi Murni APK SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*tabel 2. 8 pencapaian APK SMP/MTs 2016-2018*

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APK SMP/MTs Mencapai 91,81%	APK SMP/MTs	2016	94.20%	98,88%	104,97
		2017	95.52%	98,01%	102,60
		2018	96.22%	91,81%	95,42

Bila dilihat perkembangan capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu target ditahun 2016 APM SD/MI sebesar 94,20% menjadi 98,88%. Pada Tahun 2017 target sebesar 95,52 menjadi 98,01 sedangkan pada Tahun 2018 tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 96,22% menjadi 91,81% terjadi penurunan yang signifikan disebabkan oleh Kondisi ini disebabkan adanya beberapa anak yang berusia 7-12 tahun namun tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua dan Masih terdapat penduduk yang jauh dari jangkauan layanan pendidikan terutama

didaerah dengan geografis dan transportasi yang sulit untuk ditempuh.

#### 4. Angka Partisipasi Murni APM SMP/MTs

Untuk melihat bagaimana perkembangan APM SMP/MTs terlihat pada tabel dibawah ini:

*tabel 2.9 pencapaian APM SMP/MTs 2016/2018*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya APMSMP/MTS Mencapai 80.08%	APM SMP/MTs	2016	75.21	74.88	99.00
		2017	77.59	86.97	112.09
		2018	79.06	80.08	101.29

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2016-2018 mengalami turun dan naik. Tahun 2016 target APM SMP/MTs sebesar 75,21% namun tidak memenuhi target hanya 74, 88% Sementara ditahun 2017 mengalami kenaikan dari target 77,59% menjadi 86,97 dan tahun 2018 ditargetkan sebesar 79,06 menjadi 80,08%.

Capaian APM/SMP/MTs ini memastikan bahwa indikator kinerja ini tercapai telah dapat dilihat sebagaimana intervensi yang dilakukan dalam meningkatkan APM, antara lain melalui pemberian bantuan siswa untuk keluarga kurang mampu, bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bersumber APBD kepada seluruh siswa SMP, serta penambahan ruang kelas SMP baru dan ruang-ruang penunjang lainnya.

#### 5. Angka Kelulusan Siswa SD/MI

Untuk melihat perkembangan pencapaian persentase kelulusan terlihat pada tabel dibawah ini:

tabel 2. 10 pencapaian angka kelulusan SD/MI 2016-2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kelulusan SD/MI Mencapai 100%	Presentasi Kelulusan SD/MI	2016	100,00	100,00	100,00
		2017	100,00	100,00	100,00
		2018	100,00	100,00	100,00

Untuk kondisi selama periode 2016-2018 meningkatnya ketercapaian cukup bagus, ditahun 2016 angka kelulusan sebesar 100%, pada tahun 2017 prosentase kelulusan 100%. Pada tahun 2018, angka kelulusan 100% berhasil dipertahankan. Trend angka kelulusan di ketercapaian IKU ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan kemampuan peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional, melalui pengayaan-pengayaan, bimbingan belajar yang intensif secara berkesinambungan.

## 6. Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs

Untuk melihat perkembangan pencapaian persentase kelulusan terlihat pada tabel dibawah ini:

tabel 2. 11 pencapaian angka kelulusan SMP/MTs 2016-2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kelulusan SMP/MTs Mencapai 100%	Presentasi Kelulusan SMP/MTs	2016	100.00	100.00	100.00
		2017	100.00	100.00	100.00
		2018	100.00	100.00	100.00

Dari data diatas terlihat bahwa prestasi sejak tahun 2016 angka kelulusan jenjang SMP/MTs 100,00%, di tahun 2017 angka kelulusan juga 100,00% dan pada tahun 2018 angka kelulusan 100,00% berhasil dipertahankan.

## 7. Kebudayaan (penggalan akar budaya, pengembangan dan aktualisasi)

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Disdikbud bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait membentuk tim ahli untuk mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kabupaten. Hasil registrasi warisan budaya tersebut akan diseleksi dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Tujuannya, agar warisan-warisan budaya itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk melihat data kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu terlihat pada tabel dibawah ini:

*tabel 2. 12 data kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya	2016	0.00	0.00	0.00
		2017	20.00	100.00	100.00
		2018	20.00	100.00	100.00
	Persentase Cakupan Gelar Seni dan Budaya	2016	0.00	0.00	0.00
		2017	75.00	75.00	100.00
		2018	75.00	75.00	100.00
	Persentase Cakupan Fasilitas Seni Budaya	2016	0.00	0.00	0.00
		2017	14.28	14.28	100.00
		2018	28.57	28.57	100.00
	Persentase Cakupan Sumber daya manusia kesenian	2016	0.00	0.00	0.00
		2017	28.57	28.57	100.00
		2018	28.57	28.57	100.00

Adapun capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlihat pada [Tabel 2.14](#) (Tabel TC. 23) dibawah ini:

tabel 2. 13 T-C. 23 review pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Indikator lainnya	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian Pada Tahun ke					
					Thn. 2016 (Thn n-1)	Thn. 2017 (Thn n+1)	Thn. 2018 (Thn n+1)	Thn. 2019 (Thn n+1)	Thn. 2020 (Thn n+1)	Thn. 2021 (Thn n+1)	Thn. 2016 (Thn n-1)	Thn. 2017 (Thn n+1)	Thn. 2018 (Thn n+1)	Thn. 2019 (Thn n+1)	Thn. 2020 (Thn n+1)	Thn. 2021 (Thn n+1)	Thn. 2016 (Thn n-1)	Thn. 2017 (Thn n+1)	Thn. 2018 (Thn n+1)	Thn. 2019 (Thn n+1)	Thn. 2020 (Thn n+1)	Thn. 2021 (Thn n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	APK TK		√		60,52	65,99	68,50	72,93	75,72	78,00	70,32	74,63					116,19	113,09				
2	APK SD		√		117,18	117,22	117,44	117,52	117,58	117,60	106,39	104,42					90,79	89,08				
3	APK SMP		√		94,20	95,52	96,22	97,45	98,25	100,00	98,88	98,01					104,97	102,61				
4	APK SLTA		√		72,50	75,21	80,21	85,21	90,40	100,00	78,07						107,68	0,00				
5	APK Dikmas			√	91,72	93,34	94,96	96,58	98,2	99,81	91,89	94,32					100,19	101,05				
6	APS 7-12 Tahun		√		99,45	99,55	99,65	99,75	99,80	100,00							0,00	0,00				
7	APS 13-15 Tahun		√		77,89	82,24	86,46	88,97	93,61	97,28							0,00	0,00				
8	APS 16-18 Tahun		√		64,75	73,51	76,31	82,35	88,21	90,50							0,00	0,00				
9	APM SD		√		99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	100	99,37	93,14					99,97	93,66				
10	APM SMP		√		75,21	77,59	79,06	81,58	83,04	85,00	74,08	70,76					98,50	91,20				
11	APM SLTA		√		60,05	65,21	69,23	73,00	76,21	80,00	64,39						107,23	0,00				
12	Prosentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru			√	65,92	72,73	79,55	86,37	93,18	100,00	57,00						86,47	0,00				
13	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B		√		51,10	58,60	65,43	71,36	78,39	88,69							0,00	0,00				
14	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM	√			60,00	68,00	76,00	84,00	92,00	100,00	62,01	68,47					103,35	100,69				
15	Persentase siswa yang mendapatkan nilai kelulusan minimal sama dengan nilai rata-rata tahun sebelumnya							50	55	60												
16	Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya			√	0	20,00	26,66	33,33	33,33	33,33		20,00					0,00	100,00				
17	Persentase Cakupan Gelar Seni dan Budaya			√	0	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00		75,00					0,00	100,00				
18	Persentase Sarana Prasarana Seni Budaya			√	0	28,57	42,85	57,14	57,14	71,42		28,57					0,00	100,00				
19	Persentase Cakupan Sumber daya manusia kesenian			√	0	0	28,57	42,85	57,14	57,14							0,00	0,00				
20	Persentase budaya daerah yang dilestarikan							30,00	40,00	50,00												
21	Persentase kesenian daerah yang dilestarikan							30,00	40,00	50,00												

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program pada kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD. Dapat dilihat tabel berikut [Tabel 2.15](#) Tabel TC.24 (kemudian uraian kan)

tabel 2. 14 T-C.24 anggaran dan realisasi pendanaan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	115.091.387.500	138.663.384.787	218.566.204.394	103.607.373.010	129.434.122.031	210.545.507.106	90,02	93,34	96,33	39,05	103,21
Belanja Tidak Langsung	263.535.638.339	220.890.407.242	157.645.763.815	241.589.187.050	208.162.200.933	151.638.938.151	91,67	94,24	96,19	-22,41	-37,23
Total	378.627.025.839	359.553.792.029	376.211.968.009	345.196.560.060	337.596.322.964	362.184.445.257	91,17	93,89	96,27	-0,20	-2,20

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2016 alokasi anggaran Disdikbud sebesar Rp. **378.627.025.839** dengan serapan sebesar **345.196.560.060** prosentase sebesar 90,02 %. Pada Tahun 2017 alokasi sebesar Rp. **359.553.792.029** dengan serapan Rp. **337.596.322.964** prosentase sebesar Rp. 93,34%. Tahun 2018 alokasi sebesar Rp. **376.211.968.009** dengan serapan Rp. **362.184.445.257** prosentase sebesar Rp. 96,33%.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN

### A. Tantangan yang dihadapi

1. Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana di tunjukan dengan capaian APK PAUD pada tahun 2017 sebesar 74,62% dan kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan standarisasi layanan PAUD
2. Pemenuhan Hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal sehingga APM SD/MI pada tahun 2017 sebesar 93,13% dan APM SMP/MTs pada tahun 2017 sebesar 70,75% belum sesuai target yang diharapkan
3. Belum terpenuhinya akses pendidikan pada layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

4. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan
5. Peran pelaku seni dan budaya belum signifikan dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya

**B. Peluang yang dihadapi**

1. Adanya tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong dan kebersamaan santun dan saling menghargai. Kehidupan beragama yang rukun dan damai.
2. Meningkatnya sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
3. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
4. Adanya Peran serta Tokoh Agama dan Organisasi keagamaan terhadap pendidikan.
5. Mulai membaiknya perkembangan ekonomi masyarakat.
6. Letak Kabupaten Tanah Bumbu strategis serta pintu transit menuju Kaltim, Jatim dan Sulsel.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia pendidikan dan kebudayaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut kondisi sosial ekonomi. Adapun Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

*tabel 3.1 T-B. 35 pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan akibat meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan.	masih banyaknya penduduk usia sekolah yang belum tertampung	kurangnya sarana dan prasarana sekolah
2	Masih ditemukan adanya penduduk usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan meskipun telah disediakan pendidikan gratis dan beasiswa kaspin.	rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan masih banyak anak usia sekolah yang membantu orang tua nya bekerja	rendahnya ekonomi masyarakat khususnya wilayah pesisir
3	Tarjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan penguasaan iptek di satuan pendidikan.	Sistem pelaporan jaman modern mengharuskan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menggunakan teknologi (aplikasi)	masih rendahnya pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang teknologi
4	Pembinaan dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya belum terselenggara secara maksimal.	banyak nya keragaman budaya dan seni yang ada dikabupaten tanah bumbu	belum optimalnya sanggar seni dan budaya dikabupaten Tanah Bumbu
5	Pemeliharaan aset sejarah dan kepurbakalaan belum terselenggara secara maksimal.	rendahnya kesadaran masyarakat tentang aset sejarah dan kepurbakalaan	belum tersedianya sarana dan prasarana untuk menampung aset sejarah dan kepurbakalaan

#### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

**Visi :** Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada



keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi

**Misi :**

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritime serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bg pelaku industry guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Waki Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada pada lingkup misi ke empat.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 antara lain :

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui hal sebagai berikut:
  - a. penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga

- kurang mampu agar dapat mengikuti PIP pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- b. peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melalui hal sebagai berikut:
    - a. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
    - b. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru;
    - c. penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah.
  3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
  4. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui hal sebagai berikut:
    - a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
    - b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
    - c. peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, kota, dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui hal sebagai berikut:
  - a. diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
  - b. penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
  - c. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
  - d. peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
  - e. penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
  - f. penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (online) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
  - g. peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
  - h. penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui hal sebagai berikut:
  - a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
  - b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
  - c. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

- d. pemanfaatan hasil penilaian siswa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
  - e. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
  - f. penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel;
  - g. pengembangan sumber daya lembaga.
7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui hal sebagai berikut:
- a. pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
  - b. penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan kriteria mutu yang ketat serta kebutuhan aktual di kabupaten dan kota;
  - c. peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching;
  - d. penguatan kerja sama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
  - e. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karier.

### **3.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP RPJMD**

Perencanaan Tata Ruang Wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi, dengan demikian hal itu mempercepat proses tercapainya

kemakmuran dan kelestarian lingkungan hidup. Keserasian struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hirarki dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan akibat tata ruang yang tidak berkeadilan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan, akibatnya generasi muda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga akan melahirkan generasi yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan.

### **3.5 PENEMUAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 1 Belum tercapainya APK PAUD, APM SD, APM SMP dan Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun dan 13-15 tahun dan yang disebabkan oleh :
  - A. Masih kurangnya ruang kelas PAUD yang tersedia
  - B. Masih kurangnya ruang kelas SD yang tersedia
  - C. Masih kurangnya ruang kelas SMP yang tersedia
  - D. Masih perlunya dibangun unit sekolah baru SD
  - E. Masih perlunya dibangun unit sekolah baru SMP
  - F. Masih banyak ruang kelas SD rusak sedang/berat yang perlu direhab
  - G. Masih banyak ruang kelas SMP rusak sedang/berat yang perlu direhab
  - H. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- 2 Rendahnya Pendidikan Masyarakat yang disebabkan oleh :
  - A. Rendahnya keinginan masyarakat untuk mengikuti program keaksaraan fungsional
  - B. Rendahnya keinginan masyarakat untuk ikut program kesetaraan
1. Kurangnya Ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang disebabkan oleh Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik baik itu PAUD, SD dan SMP sehingga perlu dilaksanakan pelatihan
4. Masih kurangnya pengembangan dan pengelolaan nilai dan kekayaan budaya yang disebabkan oleh :

- A. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- B. Masih kurangnya pengembangan pelatihan kesenian dan kebudayaan daerah
- C. Masih kurangnya Pembangunan fasilitas situs sejarah dan budaya

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DASARAN JANGAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

##### A. Tujuan

*tabel 4. 1 tujuan*

T1	Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
T2	Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
T3	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah

##### B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas perlu ditetapkan beberapa sasaran strategis untuk mengukur sejauhmana tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan di atas dapat dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

*tabel 4. 2 sasaran*

Kode	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
ST1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- APK PAUD</li><li>- APK SD</li><li>- APK SMP</li><li>- APK Dikmas</li><li>- APM SD</li><li>- APM SMP</li><li>- APS 7-12 Tahun</li><li>- APS 13-15 Tahun</li></ul>
ST2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 kependidikan / Akta IV</li><li>- Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>- Persentase sekolah yang memenuhi SPM Dikdas</li><li>- Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B</li><li>- Persentase siswa yang mendapatkan nilai kelulusan minimal sama dengan nilai rata-rata tahun sebelumnya</li></ul>

ST3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan seni budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kesenian daerah yang dilestarikan</li> <li>- Persentase budaya daerah yang dilestarikan</li> </ul>
-----	---	--

#### **4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagai salah satu misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Menyelenggarakan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. dengan tujuan mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global maka sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya akses layanan pendidikan dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tertuang pada tabel berikut:



tabel 4. 3 T-C. 2.5 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	60,52	65,99	68,50	72,93	75,00	75,00
		APK SD	117,18	117,22	117,44	104,42	105,43	106,44
		APK SMP	94,20	95,52	96,22	88,47	89,46	90,5
		APK Dikmas	84,72	86,34	88,96	90,58	92,80	94,81
		APM SD	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	100,00
		APM SMP	75,21	77,59	79,06	81,58	83,04	85,00
		APS 7-12 Tahun	99,45	99,55	99,65			
		APS 13-15 Tahun	77,89	82,24	86,46			
Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase guru memenuhi standar uji kompetensi Guru	65,92	72,73	79,55			
		Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM Dikdas	60,00	68,00	76,00			
		Persentase sekolah PAUD/SD/M) yang terakreditasi B	51,10	58,60	65,43	71,36	78,39	88,69
		Persentase siswa yang mendapatkan nilai kelulusan minimal sama dengan nilai rata-rata tahun sebelumnya				50	55	60
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya	0	20	20			
		Persentase Cakupan Gelar Seni dan Budaya	0	75	75			
		Persentase Cakupan Fasilitas Seni Budaya	0	14,28	28,57			

		Persentase Cakupan Sumber daya manusia kesenian	0	28,57	28,57			
		Persentase kesenian daerah yang dilestarikan				30	40	50
		Persentase budaya daerah yang dilestarikan				30	40	50

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran rencana strategis tersebut, dipandang perlu untuk mengembangkannya ke dalam sebuah aspek strategis yang tertuang pada program dan kebijakan-kebijakan.

##### **1. Strategi**

Program Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019, menetapkan 9 agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita meliputi,

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. serta memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kapasitas dalam menyusun program operasional, sistem informasi, dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang merata pada semua tingkat dan jenjang pendidikan. Adapun strategi pencapaian tujuan sebagaimana tabel berikut :

*tabel 5. 1 T-C.26 tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan*

<b>VISI</b>	:	Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi
<b>MISI IV</b>	:	Menyelenggarakan program penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1 Peningkatan akses layanan pendidikan melalui Pendirian Unit sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang kelas baru, Rehabilitasi ruang kelas, untuk meningkatkan daya tampung bagi semua penduduk usia sekolah	1 Meningkatkan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun
		2 Penyediaan sarana-sarana pendidikan yang merata dan terjangkau pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan jalur non formal untuk penerapan dan pelaksanaan proses belajar	2 Pemerataan sarana prasarana pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan
		3 Penyediaan biaya operasional pendidikan dan bantuan operasional manajemen mutu dalam rangka meningkatkan akses, ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah	3 Pemerataan pembangunan ruang penunjang lainnya (RPL)

		4 Penyediaan biaya-biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, baik jalur formal maupun non formal dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan memperoleh layanan pendidikan	4 Pendistribusian subsidi pembiayaan operasional pendidikan merata dan berkeadilan, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu serta Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1 Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi pendidikan S1 di semua jenis dan jenjang pendidikan	1 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		2 Penyediaan Ruang Penunjang Pendidikan serta perlengkapan pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, Multimedia, ruang praktikum, workshop, aula, serta sarana prasarana olahraga dan seni	2 Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK serta penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
		3 Penyediaan pembiayaan bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi.	3 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
		4 Penyediaan kepala sekolah yang kompeten dalam pengelolaan manajerial sekolah	4 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi kepala sekolah
		5 Pemberdayaan pengawas sekolah dalam pembinaan administrasi dan manajemen sekolah	5 Perbaikan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan Mendorong transparansi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RKAS pada semua elemen sekolah
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan seni budaya	1 Memperbanyak keikutsertaan kebudayaan daerah lokal Kabupaten Tanah Bumbu pada even dan pergelaran seni budaya nasional dan internasional	1 Meningkatkan keikutsertaan kebudayaan daerah lokal Kabupaten Tanah Bumbu pada even dan pergelaran seni budaya nasional dan internasional

		2 Peningkatan kapasitas layanan dalam membangun sektor pada kebudayaan daerah	2 Meningkatkan kapasitas layanan dalam membangun sektor pada kebudayaan daerah
		3 Peningkatan Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah	3 Meningkatkan Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program pendidikan anak usia dini.
6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
7. Program pendidikan non formal.
8. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Program manajemen pelayanan pendidikan.
10. Program Pengembangan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya detail dari program dan capaian kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

tabel 6. 1 T-C. 27 rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat	1 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1 APK PAUD	1.01.1.01.1.01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	47.908.192.350	100%	50.295.150.300	100%	50.488.392.900	100%	50.532.554.000	100%	50.541.900.000	100%	50.399.119.500	100%	300.165.296.650
		2 APK SDM	1.01.1.01.1.01.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tetapnya rekening telepon, air, listrik dan surat kabar yang dibayarkan		12 bulan	185.760.000	12 bulan	241.560.000	12 bulan	247.599.000	12 bulan	253.789.000	12 bulan	260.134.000	12 bulan	260.134.000	72 bulan	1.448.976.000
		3 APK SMP/MTs	1.01.1.01.1.01.06	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		109 unit	363.500.000	109 unit	417.000.000	109 unit	427.425.000	109 unit	438.111.000	109 unit	449.063.500	109 unit	449.063.500	110 unit	2.544.163.000
		4 APK SMA/SMK/MA	1.01.1.01.1.01.07	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD		12 bulan	522.550.000	12 bulan	522.550.000	12 bulan	533.001.000	12 bulan	543.661.000	12 bulan	554.535.000	12 bulan	554.535.000	72 bulan	3.230.832.000
		5 APK Non Formal	1.01.1.01.1.01.08	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor yang tersedia		0	-	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	150.000.000
		6 APS SDM	1.01.1.01.1.01.10	5 Penyediaan ATK	Tersedianya alat tulis kantor (ATK) yang tersedia		12 bulan	296.624.100	12 bulan	277.245.800	12 bulan	302.556.000	12 bulan	308.607.000	12 bulan	314.780.000	12 bulan	314.780.000	72 bulan	1.814.592.900
		7 APS SMP/MTs	1.01.1.01.1.01.11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan		12 bulan	218.000.000	12 bulan	291.792.500	12 bulan	222.360.000	12 bulan	226.807.000	12 bulan	231.345.000	12 bulan	231.345.000	72 bulan	1.421.639.500
		8 APS SMA/SMK/MA	1.01.1.01.1.01.12	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor		12 bulan	5.350.000	12 bulan	15.286.000	12 bulan	15.668.500	12 bulan	16.060.000	12 bulan	16.461.500	12 bulan	16.461.500	72 bulan	85.287.500
		9 APM SDM	1.01.1.01.1.01.13	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	105.127.250	12 bulan	172.485.000	12 bulan	109.374.000	12 bulan	111.561.000	12 bulan	113.793.500	12 bulan	113.793.500	72 bulan	726.134.250
		10 APM SMP/MTs	1.01.1.01.1.01.15	9 Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	terbayanya rekening surat kabar / majalah		0	-	12 bulan	15.960.000	12 bulan	15.960.000	12 bulan	15.960.000	12 bulan	15.960.000	12 bulan	15.960.000	50 bulan	79.800.000
			1.01.1.01.1.01.17	10 Penyediaan bahan logistik kantor	terbayanya bahan logistik									12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	100.000.000	
						11 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat kantor		2500 kotak	171.006.000	2500 kotak	171.006.000	2500 kotak	177.914.000	2500 kotak	181.473.000	2500 kotak	185.102.500	2500 kotak	185.102.500



2	Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	11	APM SMA/SMK/MA	1.01.1.01.1.01.18	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tetaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 kali	700.000.000	100 kali	700.000.000	100 kali	700.000.000	100 kali	700.000.000	100 kali	700.000.000	600 kali	4.200.000.000
				12	Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD	1.01.1.01.1.01.19	13	Penyediaan Jasa Non PNS	Tetaksananya honor tenaga non PNS		12 bulan	44.920.725.000	12 bulan	47.020.725.000	12 bulan	47.020.725.000	12 bulan	47.020.725.000	12 bulan	47.020.725.000	72 bulan	280.024.350.000
				1	Rata-rata lama sekolah	1.01.1.01.1.01.22	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kantor disdik)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah		700 kali	419.550.000	700 kali	419.550.000	12 bulan	685.800.000	12 bulan	685.800.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	457.219.500
				2	Harapan lama sekolah	1.01.1.01.1.02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	439.500.000	100%	2.148.850.000	100%	439.500.000	100%	439.500.000	100%	439.500.000	100%	4.346.350.000
				6	Persentase Guru SMA/SMK berkualitas S1	1.01.1.01.1.02.03	1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1 unit	200.000.000	9 unit	1.909.350.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	14 unit	2.909.350.000
				8	Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade	1.01.1.01.1.02.28	2	Pemeliharaan rutin/bekala persediaan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan persediaan gedung kantor		30 unit	39.500.000	30 unit	39.500.000	30 unit	39.500.000	30 unit	39.500.000	30 unit	39.500.000	210 unit	237.000.000



14	Persentase SD minimal terakreditasi B	1.01.1.01.1.05. 04	2	Daftar Usul Pehlungan Angka Keridt ( Dupak ) guru	Jumlah penetapan daftar usul pentapan angka kredit (DUPAK)	700 orang	78.200.000	2510 orang	112.044.000	2510 orang	112.044.000	2510 orang	112.044.000	2510 orang	112.044.000	2510 orang	112.044.000	2510 orang	638.420.000		
15	Persentase SMP minimal terakreditasi B	1.01.1.01.1.15	V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	59,81%	60,52 %	5.169.415.500	65,99%	5.394.245.500	68,50%	6.734.245.500	#####	7.134.245.500	75,00%	6.134.245.500	75,00%	6.134.245.500	75,00%	36.700.643.000	
16	Persentase SMA/SMK minimal terakreditasi B	1.01.1.01.1.15. 01	1	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung TK/PAUD yang dibangun	15 unit				-	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000				2 unit	2.000.000.000		
17	Persentase PKBM minimal terakreditasi B	1.01.1.01.1.15. 03	2	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas TK/PAUD yang dibangun	29 ruang	1 ruang	2.225.000.000	4 ruang	893.800.000	5 ruang	1.125.000.000	5 ruang	1.125.000.000	5 ruang	1.125.000.000	5 ruang	1.125.000.000	25 ruang	7.618.800.000	
18	Persentase LKP minimal terakreditasi B	1.01.1.01.1.15. 04	3	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru TK/PAUD yang dibangun				2 ruang	447.800.000	2 ruang	447.800.000	2 ruang	447.800.000	2 ruang	447.800.000	2 ruang	447.800.000	10 ruang	2.239.000.000	
19	Nilai rata-rata UASBN SD	1.01.1.01.1.15. 09	4	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	3 paket	1.000.000.000	4 paket	890.800.000	4 paket	890.800.000	4 paket	890.800.000	4 paket	890.800.000	4 paket	890.800.000	4 paket	890.800.000	23 paket	5.454.000.000
20	Nilai rata-rata ujian nasional SMP	1.01.1.01.1.15. 13	5	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun	3 paket	100.000.000	-	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	11 paket	900.000.000	

			21	Nilai rata-rata ujian nasional SMA	1.01.1.01.1.15.14	6	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dibangun				5 unit	583.050.000	5 unit	583.050.000	5 unit	583.050.000	5 unit	583.050.000	5 unit	583.050.000	25 unit	2.915.250.000
			22	Nilai rata-rata ujian nasional SMK	1.01.1.01.1.15.18	7	Pengadaan alat psikd dan peraga siswa	Jumlah Alat Permainan Edukatif TK/PAUD yang tersedia	30 set	40 set	375.000.000	40 set	694.350.000	40 set	603.150.000	40 set	603.150.000	40 set	603.150.000	40 set	603.150.000	240 set	3.481.950.000
			23	Nilai Indeks Integritas UN SMP	1.01.1.01.1.15.19	8	Pengadaan meubelur sekolah	Jumlah meubelair TK/PAUD yang tersedia	96 set			72 set/buah	130.000.000	72 set/buah	130.000.000	72 set/buah	130.000.000	72 set/buah	130.000.000	72 set/buah	130.000.000	360 set/buah	650.000.000
			24	Nilai Indeks Integritas UN SMA	1.01.1.01.1.15.42	9	Rehabilitasi sedang/beset bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas TK/PAUD yang direhab	3 ruang						2 ruang	300.000.000	2 ruang	300.000.000	2 ruang	300.000.000	6 ruang	900.000.000	
			25	Nilai Indeks Integritas UN SMK	1.01.1.01.1.15.57	10	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah peserta Pelatihan kompetensi PAUD		120 orang		100 orang	65.235.000	100 orang	65.235.000	100 orang	65.235.000	100 orang	65.235.000	100 orang	65.235.000	620 orang	326.175.000
			26	Angka Putus SD	1.01.1.01.1.15.59	11	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah BOP PAUD yang tertayar		15 lembaga	1.273.713.000	15 lembaga	1.586.313.000	16 lembaga	1.686.313.000	17 lembaga	1.786.313.000	18 lembaga	1.786.313.000	18 lembaga	1.786.313.000	89 lembaga	9.905.278.000
			27	Angka Putus SMP	1.01.1.01.1.15.60	12	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terdata		316 lembaga	22.637.500	317 lembaga	31.942.500	318 lembaga	31.942.500	319 lembaga	31.942.500	319 lembaga	31.942.500	319 lembaga	31.942.500	1908 lembaga	182.350.000
			28	Angka Putus SMA/SMK	1.01.1.01.1.15.62	13	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta pelatihan keterampilan Guru PAUD dalam menyusun perangkat Pembelajaran		120 orang	173.065.000	120 orang	70.955.000	120 orang	70.955.000	120 orang	70.955.000	120 orang	70.955.000	120 orang	70.955.000	720 orang	527.840.000
						14	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang menerima (BOS)							17 lembaga	1.000.000.000	18 lembaga	1.000.000.000	18 lembaga	1.000.000.000	32 lembaga	3.000.000.000	

29	Persetase Sekolah Yang Menerapkan MBS SD	1.01.1.01.1.16	VI	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	- APK SD - APK SMP - APMSD - APMSMP	117,10% 93,01% 99,36% 73,64%	117,58% 94,20% % 99,40% % 75,21% %	55.229.329.000	117,22% 95,52% 99,45% 77,59%	110.633.278.787	117,44% 96,22% 99,50% 79,09%	112.919.830.037	104,42% 88,47% 99,55% 81,58%	114.182.830.037	105,43% 89,46% 99,60% 83,04%	109.460.830.037	106,44% 90,50% 100,00% 85,00%	109.460.830.037	106,44% 90,50% 100,00% 85,00%	611.886.927.935
		1.01.1.01.1.16.01	1	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah USB SD yang dibangun	1 unit	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.500.000.000					4 unit	6.000.000.000
30	Persetase Sekolah Yang Menerapkan MBS SMP	1.01.1.01.1.16.02	2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1 unit	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000					6 unit	1.200.000.000
		1.01.1.01.1.16.03	3	Perubahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	73 ruang	42 ruang	9.289.400.000	18 ruang	3.520.000.000	14 ruang	3.080.000.000	16 ruang	3.520.000.000	14 ruang	3.080.000.000	14 ruang	3.080.000.000	118 ruang	25.569.400.000
31	Persetase Sekolah Yang Menerapkan MBS SMA/SMK	1.01.1.01.1.16.04	4	Perubahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SD yang dibangun	6 ruang	11 ruang	2.778.263.500	13 ruang	2.860.000.000	10 ruang	2.200.000.000	12 ruang	2.640.000.000	10 ruang	2.200.000.000	10 ruang	2.200.000.000	65 ruang	14.878.263.500
		1.01.1.01.1.16.09	5	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah pagar SD yang dibangun	8 Paket	27 paket	5.712.200.000	17 paket	3.740.000.000	17 paket	3.740.000.000	17 paket	3.740.000.000	17 paket	3.740.000.000	17 paket	3.740.000.000	112 paket	24.412.200.000
		1.01.1.01.1.16.11	6	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah Musholla yang dibangun		0	-	2 ruang	400.000.000	2 ruang	400.000.000	2 ruang	400.000.000	2 ruang	400.000.000	2 ruang	400.000.000	10 ruang	2.000.000.000
		1.01.1.01.1.16.12	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun	79 Unit	1 unit	230.350.000	21 unit	4.620.000.000	22 unit	4.840.000.000	22 unit	4.840.000.000	22 unit	4.840.000.000	22 unit	4.840.000.000	136 unit	24.210.350.000
		1.01.1.01.1.16.13	8	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan penfungsian nya	Jumlah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan penfungsian nya				2 paket	207.050.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	7 paket	607.050.000
		1.01.1.01.1.16.14	9	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) yang dibangun	5 unit	1 unit	226.300.000	18 unit	1.326.900.000	18 unit	1.326.900.000	18 unit	1.326.900.000	18 unit	1.326.900.000	18 unit	1.326.900.000	91 unit	6.860.800.000
		1.01.1.01.1.16.18	10	Pengadaan alat parkir dan penga siswa	Jumlah Pengadaan alat parkir dan penga siswa SD yang tersedia				40 set	804.200.000	50 set	1.005.250.000	50 set	1.005.250.000	50 set	1.005.250.000	50 set	1.005.250.000	240 set	4.825.200.000
		1.01.1.01.1.16.19	11	Pengadaan meubeler sekolah	Jumlah meubeler SD	5200 set	1321 set	1.377.000.000	1500 set	1.573.550.000	1500 set	1.573.550.000	1500 set	1.573.550.000	1500 set	1.573.550.000	1500 set	1.573.550.000	8821 set	9.244.750.000

1.01.1.01.1.16.42	12	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang direhab			1 unit	117.250.000	1 unit	117.250.000	1 unit	117.250.000	1 unit	117.250.000	1 unit	117.250.000	5 unit	586.250.000		
1.01.1.01.1.16.44	13	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	9 Ruang	4 ruang	672.850.000	56 ruang	5.600.000.000	56 ruang	5.600.000.000	56 ruang	5.600.000.000	56 ruang	5.600.000.000	56 ruang	5.600.000.000	284 ruang	28.672.850.000	
1.01.1.01.1.16.54	14	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang direhab				2 unit	233.650.000	2 unit	233.650.000	2 unit	233.650.000	2 unit	233.650.000	2 unit	233.650.000	10 unit	1.168.250.000	
1.01.1.01.1.16.56	15	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary (MCK) SD yang direhab	Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) SD yang direhab				5 unit	307.500.000	5 unit	307.500.000	5 unit	307.500.000	5 unit	307.500.000	5 unit	307.500.000	25 unit	1.537.500.000	
1.01.1.01.1.16.59	16	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum	200 Orang	386 orang	81.892.000	386 orang	132.508.000	386 orang	132.508.000	386 orang	132.508.000	386 orang	132.508.000	386 orang	132.508.000	2316 orang	744.432.000	
1.01.1.01.1.16.67	17	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah Warga Belajar Paket A Setara SD/MI	855 Warga belajar			160 wb	60.340.000	200 wb	75.000.000	200 wb	75.000.000	100 wb	50.000.000	100 wb	50.000.000	760 wb	310.340.000	
1.01.1.01.1.16.68	18	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah warga belajar Paket B Setara SMP/MTs	1048 Warga belajar			200 wb	201.900.000	240 wb	250.000.000	240 wb	250.000.000	120 wb	120.000.000	120 wb	120.000.000	920 wb	941.900.000	
1.01.1.01.1.16.70	19	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD	Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD	4 cabang	5 cabang	441.755.000	11 cabang	548.329.000	11 cabang	548.329.000	11 cabang	548.329.000	11 cabang	548.329.000	11 cabang	548.329.000	60 cabang	3.183.400.000	
1.01.1.01.1.16.72	20	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah Guru SMP Mengikuti Pelatihan IT Untuk Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah	300 orang			80 orang	120.000.000	80 orang	120.000.000	80 orang	120.000.000	80 orang	120.000.000	80 orang	120.000.000	400 orang	600.000.000	
1.01.1.01.1.16.73	21	Penyebutan dan sosialisasi sebagai informasi pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang diwawasi capaian SPM dan SNP	249 sekola h		31.148.000	292 sekolah	200.000.000	292 sekolah	200.000.000	292 sekolah	200.000.000	292 sekolah	200.000.000	292 sekolah	200.000.000	1709 sekolah	1.031.148.000	
1.01.1.01.1.16.76	22	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang diakreditasi jenjang pendidikan Dasar	68 sekola h		79.542.000	56 sekolah	67.200.000	56 sekolah	67.200.000	56 sekolah	67.200.000	56 sekolah	67.200.000	56 sekolah	67.200.000	348 sekolah	415.542.000	
1.01.1.01.1.16.78	23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil movev untuk seluruh penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2 doku men		18.671.500	2 dokumen	18.671.500	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	12 dokumen	117.343.000	
1.01.1.01.1.16.79	24	Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Jumlah Peserta UAS dan UN SMP/MTs	4468 siswa	4678 siswa	370.684.500	5363 siswa	371.439.750	5900 siswa	373.000.000	6480 siswa	376.000.000	7139 siswa	379.000.000	7139 siswa	379.000.000	36529 siswa	2.246.124.250	
1.01.1.01.1.16.x	25	Peningkatan Mutu SMP	Jumlah Buku Kurikulum SMP yang tersedia	-		-	-	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	4 paket	2.000.000.000
1.01.1.01.1.16.96	26	Ujian sekolah SD/MI	Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI	5000 siswa	5850 siswa	316.472.500	6435 siswa	263.097.500	7078 siswa	270.000.000	7785 siswa	280.000.000	8563 siswa	290.000.000	8563 siswa	290.000.000	44274 siswa	1.709.570.000	
1.01.1.01.1.16.97	27	Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP) Jenjang SD/MI	Jumlah dana operasional BOP SD	209 sekola h		11.015.460.000	210 sekolah	11.115.460.000	211 sekolah	11.215.460.000	212 sekolah	11.315.460.000	212 sekolah	11.315.460.000	212 sekolah	11.315.460.000	1266 sekolah	67.292.760.000	

1.01.1.01.1.16.98	28	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SD)	Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SD) yang tersedia	1000 siswa	2.009.450.000	1000 siswa	2.009.450.000	1000 siswa	2.009.450.000	1000 siswa	2.009.450.000	1000 siswa	2.009.450.000	1000 siswa	2.009.450.000	6000 siswa	12.056.700.000
1.01.1.01.1.16.99	29	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SMP)	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum	300 orang	300.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	1050 orang	1.050.000.000
1.01.1.01.1.16.100	30	Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Jelang SMP/MTs	Jumlah dana operasional BOP SMP	81 sekolah	6.130.550.000	83 sekolah	6.130.550.000	84 sekolah	6.230.550.000	85 sekolah	6.280.550.000	85 sekolah	6.280.550.000	85 sekolah	6.280.550.000	505 sekolah	37.333.300.000
1.01.1.01.1.16.101	31	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP)	Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP) yang tersedia	1000 siswa	2.010.350.000	1000 siswa	3.210.350.000	1500 siswa	3.210.350.000	1500 siswa	3.210.350.000	1500 siswa	3.210.350.000	1500 siswa	3.210.350.000	6500 siswa	18.062.100.000
1.01.1.01.1.16.102	32	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (SMP)	Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	23 cabang	690.990.000	25 cabang	700.000.000	25 cabang	700.000.000	25 cabang	700.000.000	25 cabang	700.000.000	25 cabang	700.000.000	148 cabang	4.190.990.000
1.01.1.01.1.16.103	33	Pembangunan Gedung Sekolah (SMP)	Jumlah Gedung USB SMP yang dibangun	4 unit	4.000.000.000			1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000					4 unit	8.000.000.000
1.01.1.01.1.16.104	34	Perantaraan Ruang Kelas (SMP)	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	24 ruang	2.200.000.000	20 ruang	3.993.874.000	20 ruang	3.993.874.000	20 ruang	3.993.874.000	20 ruang	3.993.874.000	20 ruang	3.993.874.000	111 ruang	22.169.370.000
1.01.1.01.1.16.105	35	Pembangunan Kantor Guru (SMP)	Jumlah kantor guru SMP yang dibangun	2 ruang	462.950.000	8 ruang	1.794.650.000	8 ruang	1.794.650.000	8 ruang	1.794.650.000	8 ruang	1.794.650.000	8 ruang	1.794.650.000	42 ruang	9.436.200.000
1.01.1.01.1.16.106	36	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Pakir (SMP)	Jumlah pagar SMP yang dibangun	4 paket	1.662.400.000	5 paket	1.128.350.000	5 paket	1.128.350.000	5 paket	1.128.350.000	5 paket	1.128.350.000	5 paket	1.128.350.000	33 paket	7.324.150.000
1.01.1.01.1.16.107	37	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	6 unit		4 unit	900.250.000	4 unit	900.250.000	4 unit	900.250.000	4 unit	900.250.000	4 unit	900.250.000	20 unit	4.501.250.000
1.01.1.01.1.16.108	38	Pembangunan ruang setor guru (SMP)	Jumlah ruang setor guru SMP yang dibangun			1 ruang	440.650.000	1 ruang	440.650.000	1 ruang	440.650.000	1 ruang	440.650.000	1 ruang	440.650.000	5 ruang	2.203.250.000
1.01.1.01.1.16.109	39	Pembangunan Laboratorium (SD)	Jumlah Laboratorium SD yang dibangun		-		-		-	1 unit	220.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	220.000.000	3 unit	660.000.000
1.01.1.01.1.16.109	40	Pembangunan Laboratorium (SMP)	Jumlah Laboratorium SMP yang dibangun	8 unit		11 unit	2.460.500.000	11 unit	2.460.500.000	11 unit	2.460.500.000	11 unit	2.460.500.000	11 unit	2.460.500.000	63 unit	12.302.500.000
1.01.1.01.1.16.110	41	Rehabilitasi sedang/besut ruang kelas sekolah (SMP)	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	16 ruang		26 ruang	2.836.800.000	26 ruang	2.836.800.000	26 ruang	2.836.800.000	26 ruang	2.836.800.000	26 ruang	2.836.800.000	130 ruang	14.184.000.000
1.01.1.01.1.16.111	42	Pengadaan Meubelair (SMP)	Jumlah meubelair SMP	... Set	612 set	836.400.000	1500 set	1.316.150.000	1500 set	1.316.150.000	1500 set	1.316.150.000	1500 set	1.316.150.000	1500 set	8112 set	7.417.150.000
1.01.1.01.1.16.112	43	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (SMP)	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi (MCK) SMP yang dibangun	30 unit	364.250.000	13 unit	2.742.500.000	13 unit	2.742.500.000	13 unit	2.742.500.000	13 unit	2.742.500.000	13 unit	2.742.500.000	67 unit	14.076.750.000
1.01.1.01.1.16.113	44	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (SMP)	Jumlah Pengadaan alat praktik dan praga siswa SMP yang tersedia			25 set	504.400.000	25 set	504.400.000	25 set	504.400.000	25 set	504.400.000	25 set	504.400.000	125 set	2.522.000.000
1.01.1.01.1.16.114	45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI yang tersedia	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI yang tersedia			178 sekolah	26.529.459.037	178 sekolah	26.529.459.037	178 sekolah	26.529.459.037	178 sekolah	26.529.459.037	178 sekolah	26.529.459.037	712 sekolah	132.647.256.185

1.01.1.01.1.16.115	46	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs yang tersedia				58 sekolah	10.892.700.000	58 sekolah	10.892.700.000	58 sekolah	10.892.700.000	58 sekolah	10.892.700.000	58 sekolah	10.892.700.000	232 sekolah	54.463.500.000
	47	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (SMP)	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP yang dibangun	1 unit			1 unit	225.400.000	1 unit	225.400.000	1 unit	225.400.000	1 unit	225.400.000	1 unit	225.400.000	5 unit	1.127.000.000
	48	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (SMP)	Jumlah perpustakaan SMP yang direhab				2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	10 unit	2.254.000.000
	49	Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium (SMP)	Jumlah ruang laboratorium SMP yang direhab				2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	2 unit	450.800.000	10 unit	2.254.000.000
	50	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru (SMP)	Jumlah ruang guru SMP yang direhab				6 ruang	1.456.600.000	6 ruang	1.456.600.000	6 ruang	1.456.600.000	6 ruang	1.456.600.000	6 ruang	1.456.600.000	30 ruang	7.283.000.000
	51	Peningkatan Mutu SD	Jumlah Buku Kurikulum SD yang tersedia			-		-	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	4 paket	2.000.000.000
1.01.1.01.1.17	VII	Program Pendidikan Menengah	- APK SMA/SMK/MA - APM SMA/SMK/MA	72,22% 60,54%	72,5% 60,05 %	13.155.426.500												13.155.426.500
1.01.1.01.1.17.01	1	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah USB SMA/SMK yang dibangun															-
1.01.1.01.1.17.03	2	Perambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK yang dibangun	307	3 ruang	447.200.000											3 ruang	447.200.000
1.01.1.01.1.17.04	3	Perambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SMA/SMK yang dibangun															-
1.01.1.01.1.17.05	4	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	Jumlah Lab SMA/SMK yang dibangun															-
1.01.1.01.1.17.09	5	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pagar SMA/SMK yang terbangun															-
1.01.1.01.1.17.12	6	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMA/SMK yang dibangun															-
1.01.1.01.1.17.13	7	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun	Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun															-
1.01.1.01.1.17.14	8	Pembangunan sarana air bersih sanitasi	Jumlah WC SMA/SMK yang dibangun															-



1.01.1.01.1.17.18	9	Pengadaan alat praktik dan penga siswa	Jumlah Pengadaan alat praktik dan penga siswa SMA/SMK yang tersedia																-
1.01.1.01.1.17.19	10	Pengadaan meubeler sekolah	Jumlah Meubelair SMA/SMK yang tersedia																-
1.01.1.01.1.17.44	11	Rehabilitasi sedang/besut ruang kelas sekolah	Jumlah rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK																-
1.01.1.01.1.17.45	12	Rehabilitasi sedang/besut ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru SMA/SMK yang dirhab																-
1.01.1.01.1.17.58	13	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	250	200 orang	163.524.000												200 orang	163.524.000
1.01.1.01.1.17.61	14	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Jumlah dana BOMM SMA/SMK/MA yang tersedia	36 sekolah	37 sekolah	10.485.880.000												37 sekolah	10.485.880.000
1.01.1.01.1.17.62	15	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SMA/SMK/MA yang tersedia	260	500 siswa	1.204.950.000												500 siswa	1.204.950.000
1.01.1.01.1.17.63	16	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Jumlah Warga belajar Paket C yang diselenggara			-													-
1.01.1.01.1.17.69	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Movev	8	3 dokumen	28.397.500												3 dokumen	28.397.500
1.01.1.01.1.17.71	18	Ujian Nasional Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Try Out dan Ujian Nasional SMA/SMK/MA	3456 siswa	3858 siswa	236.450.000												3858 siswa	236.450.000
1.01.1.01.1.17.72	19	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa	4 cabang	4 cabang	589.025.000												4 cabang	589.025.000
1.01.1.01.1.18	VIII	Pendidikan Non formal	APK Dikmas	82,61%	84,72 %	348.750.000	86,34%	1.004.105.000	88,98%	1.511.365.000	#####	1.021.365.000	92,80%	1.031.365.000	94,81%	1.031.365.000	94,81%		5.948.315.000
1.01.1.01.1.18.01	1	Pembelajaran tenaga pendidik non formal	Jumlah Peserta PTK PNF		16 orang	74.540.000		-		-		-		-		-			74.540.000
	2	Pembelan bantuan operasional pendidikan non formal	Dana Operasional Pendidikan Non Formal						10 PKBM	500.000.000									
1.01.1.01.1.18.04	3	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Warga Belajar KF		500 wb	274.210.000		-		-		-		-		-			274.210.000
1.01.1.01.1.18.06	4	Penyediaan sarana dan pasarana pendidikan non formal	Jumlah gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tanah Bumbu yang dibangun			-	2 unit	216.900.000	2 unit	216.900.000	2 unit	216.900.000	2 unit	216.900.000	2 unit	216.900.000	10 unit		1.084.500.000

1.01.1.01.1.18. 07	5	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah Data dan Informasi Pendidikan Non Formal				34 lembaga	33.330.000	35 lembaga	35.000.000	36 lembaga	40.000.000	37 lembaga	45.000.000	37 lembaga	45.000.000	179 lembaga	198.330.000
1.01.1.01.1.18. 09	6	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF	Jumlah peserta pelatihan kompetensi bagi tutor KF			-	50 orang	44.410.000	50 orang	50.000.000	50 orang	55.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	60.000.000	250 orang	269.410.000
1.01.1.01.1.18. 16	7	Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Warga Belajar KF			-	500 wb	228.875.000	500 wb	228.875.000	500 wb	228.875.000	500 wb	228.875.000	500 wb	228.875.000	2500 wb	1.144.375.000
1.01.1.01.1.18. 17	8	Penyelenggaraan Paket C setara SMA/SMK	Jumlah Warga Belajar Paket C setara SMA/MA			-	500 wb	375.150.000	500 wb	375.150.000	500 wb	375.150.000	500 wb	375.150.000	500 wb	375.150.000	620 lomba	1.875.750.000
1.01.1.01.1.18. 18	9	Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal	Jumlah lomba yang dilaksanakan			-	30 lomba	105.440.000	30 lomba	105.440.000	30 lomba	105.440.000	30 lomba	105.440.000	30 lomba	105.440.000	150 lomba	527.200.000
1.01.1.01.1.19	IX	Program Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB)	Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLKK)	82%	87%	132.090.000		-		-		-		-		-		132.090.000
1.01.1.01.1.19. 56	1	Pelatihan Kompetensi Pendidik SLB	Jumlah peserta pelatihan kompetensi guru Sekolah Luar Biasa (SLB)		14 guru	30.073.000		-		-		-		-		-	14 guru	30.073.000
1.01.1.01.1.19. 57	2	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB)		14 guru	30.073.000		-		-		-		-		-	14 guru	30.073.000
1.01.1.01.1.19. 61	3	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SLB	Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SLB		5 cabang 9	71.944.000				-		-		-		-	5 cabang	71.944.000
1.01.1.01.1.20	X	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru memenuhi standar uji kompetensi Guru - Persentase guru memenuhi standar kompetensi - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 - Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	55,91%	65,92	141.617.000	72,73	4.173.000.000	79,55	5.656.795.000	80,73 91,00 33,00	5.391.210.000	82,24 93,00 33,60	5.334.845.000	85,00 95,00 34,01	5.334.845.000	85,00 95,00 34,01	26.032.312.000
1.01.1.01.1.20. 02	1	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tetapannya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			-		-	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	400 guru	200.000.000

			1.01.1.01.1.20.03	2	Pelatihan bagi pendik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMP yang diatih			-	300 orang	74.470.000	300 orang	75.000.000	300 orang	80.000.000	300 orang	85.000.000	300 orang	85.000.000	1500 guru	399.470.000
			1.01.1.01.1.20.04	3	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dengan Basis MES			-		-	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	4 kali	1.400.000.000
			1.01.1.01.1.20.07	4	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMP yang diatih			-		-	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	400 orang	1.200.000.000
			1.01.1.01.1.20.08	5	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendik dan tenaga kependidikan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang diatih			-		-	75 orang	601.950.000	25 orang	200.000.000	20 orang	160.000.000	20 orang	160.000.000	140 orang	1.121.950.000
			1.01.1.01.1.20.10	6	Pengembangan sistem pengajaran dan pefitruangan terhadap profesi pendidik	Jumlah Pemilihan PTK Berprestasi Guru dan Kepala Sekolah	30 orang	141.617.000		30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	180 orang	891.617.000
			1.01.1.01.1.20.13	7	Pembinaan Masyarakat Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Jumlah Pembinaan Guru Mata Pelajaran			-	570 orang	195.050.000	570 orang	200.000.000	570 orang	205.000.000	570 orang	210.000.000	570 orang	210.000.000	2850 orang	1.020.050.000
			1.01.1.01.1.20.21	8	Pendidikan Pelatihan Guru Pembina OSN	Jumlah Guru Berprestasi			-	290 orang	3.500.750.000	290 orang	3.500.750.000	290 orang	3.500.750.000	290 orang	3.500.750.000	290 orang	3.500.750.000	1450 orang	17.503.750.000
			1.01.1.01.1.20.22	9	Pendidikan Tindaklanjut Hasil UKG	Jumlah Guru yang mengikuti Diklat			-	1000 orang	252.730.000	1500 orang	379.095.000	2000 orang	505.460.000	1500 orang	479.095.000	1500 orang	479.095.000	7500 orang	2.095.475.000
			1.01.1.01.1.20.x x	10	Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)	Tetaksananya evaluasi program-program sekolah			-		-	287 sekolah	50.000.000	287 sekolah	50.000.000	287 sekolah	50.000.000	287 sekolah	50.000.000	1148 sekolah	200.000.000
			1.01.1.01.1.22	XI	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SPM	52,37%	60,00 %	182.762.000	68,00%	216.952.000	76,00%	216.952.000	#####	216.952.000	92,00%	216.952.000	#####	216.952.000	100,00%	1.267.522.000
			1.01.1.01.1.22.07	1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pelatihan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	6 kali	182.762.000		8 kali	216.952.000	8 kali	216.952.000	8 kali	216.952.000	8 kali	216.952.000	8 kali	216.952.000	46 kali	1.267.522.000
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah			2.16.1.01.01.15	XII	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya - Persentase Cakupan Gelar Seni dan Budaya - Persentase Sarana Prasarana Seni Budaya - Persentase Budaya Daerah yang dilestarikan			-	30,00 % 75,00 % 28,57 %	664.000.000	30,00 % 75 % 42,85 %	780.000.000	30,00%	1.100.000.000					30,00%	2.544.000.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai amanat dan tujuan dari undang-undang dan peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, maka penyusunan rencana strategis (Renstra) 2016 – 2021 menjadi keharusan bagi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan unit kerja di semua level dalam menjalankan tugas. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan APBD. Oleh karenanya diperlukan penetapan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun yang akan datang, sehingga akan tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja dan masukan (*input*) agar penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dapat dimantapkan.

Uraian tentang indikator kinerja pada Renstra ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

tabel 7.1 T-C.28 indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	APK PAUD	59,81	60,52	65,99	68,50	72,93	75,72	78,00
2	APK SD	117,10	117,18	117,22	117,44	117,52	117,58	117,60
3	APK SMP	93,01	94,20	95,52	96,22	97,45	98,25	100
4	APK Dikmas	82,61	91,72	93,34	94,96	96,58	98,2	99,81
5	APM SD	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	100
6	APM SMP	73,64	75,21	77,59	79,06	81,58	83,04	85,00
7	APS 7-12 Tahun	99,35	99,45	99,55	99,65	99,75	99,80	100,00
8	APS 13-15 Tahun	73,64	77,89	82,24	86,46	88,97	93,61	97,28
9	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 kependidikan / Akta IV	55,91	65,92	72,73	79,55	86,37	93,18	100
10	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik							
11	Persentase sekolah yang memenuhi SPM Dikdas		60	68	76	84	92	100
12	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B	45,05	51,10	58,60	65,43	71,36	78,39	88,69
13	Persentase siswa yang mendapatkan nilai kelulusan minimal sama dengan nilai rata-rata tahun sebelumnya							
14	Persentase budaya daerah yang dilestarikan					30		
15	Persentase kesenian daerah yang dilestarikan							

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**


Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan rencana tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan

  
**Ir. Sartono, M. Si**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**